



Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Masyarakat Oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna

Argogon^{1*}, Sulfa² 

^{1,2}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Corresponding Author, E-mail: argogonw@gmail.com

Diterima: 20 November 2023 Direvisi: 15 Januari 2023 Disetujui: 13 Maret 2023 Dipublikasi: 12 April 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan pada masyarakat Kabupaten Muna; 2) mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan pada masyarakat Kabupaten Muna. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan subjek penelitian ini terdiri dari 6 orang. Instrumen penelitian ini digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi. Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat Kabupaten Muna sudah berjalan dengan baik hal ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1) Partai politik harus memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara supaya masyarakat memiliki kesadaran politik (*wah'yu siyasi*); 2) Partai politik memberikan wawasan kepada masyarakat akan tertanam keyakinan politik yang akan membentuk kepribadian politik (*dzat siyasiyah*); 3) Munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiyah*) untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif Faktor yang mempengaruhi penerapan pendidikan politik, yaitu: 1) faktor individu terdiri dari apatisme dan sinisme politik dan rendahnya latar belakang pendidikan; 2) faktor lingkungan terdiri dari money politik dan kampanye hitam.

Kata Kunci: Pendidikan politik, masyarakat, partai politik

Implementation of Political Education in the Community by the PDI Perjuangan Branch Leadership Council of Muna Regency

Abstrac: This study aims to: 1) describe the implementation of PDI Perjuangan political education in the community of Muna Regency; 2) describe the factors that influence the implementation of PDI Perjuangan political education in the community of Muna Regency. This research method uses a qualitative approach and the subjects of this study consisted of 6 people. The research instruments used were interviews and documentation. The steps of data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of this study indicate that the implementation of political education in the community of Muna Regency has been going well, this is done in three ways, namely: 1) Political parties must provide political knowledge to the community about the rights and obligations as citizens so that the community has political awareness (*wah'yu siyasi*); 2) Political parties provide insight to the community that political beliefs will be embedded that will form political personalities (*dzat siyasiyah*); 3) The emergence of political participation (*musyarokah siyasiyah*) to deepen the sense of responsibility of both the rulers and the people and is a means to strengthen collective governance. Factors that influence the implementation of political education, namely: 1) individual factors consisting of political apathy and cynicism and low educational background; 2) environmental factors consisting of money politics and black campaigns.

Keywords: Political education, society, political parties

PENDAHULUAN

Permasalahan Pembangunan di masyarakat, terutama di negara berkembang yang telah memiliki hak untuk mengatur negara yang sudah merdeka dan telah bersiap untuk membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan dalam bidang politik. menghadapi pelaksanaan pembangunan politik seringkali terjadi dalam praktik pelaksanaan pembangunan politik tidak dapat membedakan posisinya sebagai negara yang baru merdeka dan harus mensejahterakan rakyat serta menjalankan tugas perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi dengan kedudukannya sebagai negara yang baru merdeka untuk memberikan dan mendistribusikan kesejahteraan, kebebasan dan keadilan kepada masyarakatnya (Adityawarman, 2020).

Pembangunan politik merupakan pengembangan dari Teori Politik yang menjadikan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang ada dalam satu wilayah berkomitmen untuk menjadikan kehidupan masyarakat lebih teratur. Perkembangan studi pembangunan politik tidak dapat dipisahkan dari subdisiplin Kualitas Demokrasi karena pembangunan politik dan demokrasi sering dianggap



sebagai satu kesatuan. Kualitas Demokrasi menghasilkan studi Pembangunan Politik sebaliknya Pembangunan politik adalah studi meningkatkan kualitas demokrasi (Adityawarman, 2020).

Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional, dimana pembangunan itu ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik. Pembangunan politik merupakan pengembangan dari teori politik yang menjadikan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang ada dalam satu wilayah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat lebih teratur. Perkembangan studi pembangunan politik dan demokrasi sering dianggap sebagai satu kesatuan. Kualitas demokrasi menghasilkan studi pembangunan politik dan sebaliknya pembangunan politik adalah studi meningkatkan kualitas demokrasi.

Katz (Suryono, 2010) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang lebih bernilai itu adalah sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain, atau dari negara yang satu ke negara yang lain. Rogers (Suryono, 2010). Menurutnya, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material, bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

Pembangunan politik bukanlah sekedar perubahan politik, melainkan pengembangan kesadaran politik masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan. Artinya jika pendidikan nasional harus juga mengemban misi pembangunan politik, maka ia harus juga memajukan semua orang, meningkatkan kesadaran hak dan tanggung jawab politik mereka, meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan tentu saja juga harus melengkapi prediksi mereka sebagai manusia seutuhnya.

Partai politik sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi oleh ilmuwan politik ialah sistem nilai politik, struktur kekuasaan, strategi penanganan permasalahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan teknologi) dan fisik (sumber alam) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dikemukakan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan perlu diwujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai diarahkan pada dua hal utama yaitu pertama, membuka sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap masyarakat melalui pendidikan politik atau pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik.

Satu diantara fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Dengan adanya pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan masyarakat melek politik, dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik sangat diperlukan untuk warga negara yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang politik, selain itu juga pendidikan politik diperuntukkan bagi warga negara yang sudah memiliki pengetahuan politik hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya tingkat apatis masyarakat dalam kegiatan politik.

Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap salah satu pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna menyatakan bahwa PDI Perjuangan masih kurang dalam melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat Kabupaten Muna, Seperti kurangnya sosialisasi pendidikan politik dimasyarakat sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat Kabupaten Muna.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pertimbangan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Muna merupakan salah satu partai yang menerapkan pelaksanaan peran partai dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat kabupaten muna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang peneliti memberikan gambaran secara ilmiah dari data-data yang di dapatkan di lapangan mengenai pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan pada masyarakat Kabupaten Muna.

Subjek penelitian ini terdiri dari unsur pimpinan PDI Perjuangan, Ketua DPC PDI Perjuangan, Pengurus DPC PDI Perjuangan, Staf, dan masyarakat. Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan *Purposive Snowball Sampling*. Mula-mula peneliti menentukan satu subyek (*purposive*) kemudian

dikembangkan kepada subyek yang lain (Snowball) sampai memperoleh data yang jelas. Dalam penelitian ini peneliti hanya menemui 6 orang sebagai subjek penelitian karena dengan 6 orang tersebut sudah cukup untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun teknik. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Milles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendidikan Politik pada Masyarakat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna

Pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan Kabupaten Muna pada masyarakat Kabupaten Muna sangat penting, dengan adanya pendidikan politik ini diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan politik yang baik. Adapun pelaksanaan pendidikan PDI Perjuangan Kabupaten Muna kepada masyarakat Kabupaten Muna dapat dilihat sebagai berikut:

1. Partai Politik Harus Memberikan Pengetahuan Politik Kepada Masyarakat Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Supaya Masyarakat Memiliki Kesadaran Politik

- a. Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di lapangan kecamatan kontunaga, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara temu kader dan masyarakat yang mengangkat tema kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara bertujuan untuk memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara supaya masyarakat memiliki kesadaran politik.
- b. Kesadaran Perlunya Pemerintah yang Legitimate/Sah
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya dalam melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di lapangan kecamatan kontunaga, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara temu kader dan masyarakat yang mengangkat tema kesadaran perlunya pemerintahan yang legitimate/sah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara supaya masyarakat memiliki kesadaran politik.
- c. Kesadaran Perlunya Mengikuti Perkembangan Informasi Politik
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabanag PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di lapangan kecamatan, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara temu kader dan masyarakat yang mengangkat tema kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara supaya masyarakat memiliki kesadaran politik (wah'yu siyasi).
- d. Kesadaran Perlunya Mengikuti Kegiatan Politik
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabanag PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di lapangan kecamatan kontunaga, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara temu kader dan masyarakat yang mengangkat tema kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara supaya masyarakat memiliki kesadaran politik.

2. Partai Politik Memberikan Wawasan Kepada Masyarakat Akan Tertanam Keyakinan Politik yang Akan Membentuk Kepribadian Politik (Dzat Siyasiyah)

- a. Meningkatkan Kemandirian
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabanag PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurus dan kadernya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di kecamatan lohia, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara kader memberikan sosialisasi pada masyarakat yang mengangkat tema meningkatkan kemandirian politik bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat akan tertanam keyakinan politik yang akan membentuk kepribadian politik.

- b. Meningkatkan Kedewasaan
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabanag PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurus dan kadernya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di kecamatan lohia, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara pengurus dan kader memberikan sosialisasi pada masyarakat yang mengangkat tema meningkatkan kedewasaan berpolitik bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat akan tertanam keyakinan politik yang akan membentuk kepribadian politik.
- c. Membangun Karakter Bangsa Dalam Rangka Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabanag PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di kecamatan lohia, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi pada masyarakat yang mengangkat tema membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat akan tertanam keyakinan politik yang akan membentuk kepribadian politik.

3. Munculnya Partisipasi Politik (Musyarokah Siyasiyah) Untuk Memperdalam Rasa Tanggung Jawab pada Diri Penguasa Maupun Rakyat dan Merupakan Sarana untuk Memperkokoh Pemerintahan Kolektif

- a. Mengikuti Diskusi Politik
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabanag PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di kecamatan batalaiworu, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan temu kader dan berdiskusi bersama masyarakat yang bertemakan mumbuhkan rasa minat masyarakat untuk mengikuti diskusi politik bertujuan memeberikan pemahaman tentang partisipasi politik (musyarokah siyasiyah) untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif.
- b. Mengikuti Kampanye Politik
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabanag PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di kecamatan batalaiworu, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan temu kader dan berdiskusi bersama masyarakat yang bertemakan pentingnya mengikuti kampanye politik bertujuan memberikan pemahaman tentang partisipasi politik (musyarokah siyasiyah) untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif.
- c. Menggunakan Hak Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabanag PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat di kecamatan batalaiworu, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan temu kader dan berdiskusi bersama masyarakat yang bertemakan cara menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertujuan memberikan pemahaman tentang partisipasi politik (musyarokah siyasiyah) untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Politik PDI Perjuangan Pada Masyarakat di Kabupaten Muna

1. Faktor Individu

- a. Apatisme dan Sinisme Politik
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya dalam melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat kabupaten muna, dalam kegiatan tersebut masyarakat sudah tidak apatisme dan sinisme terhadap pendidikan politik yang diberikan oleh partai PDI Perjuangan kabupaten muna dan banyak masyarakat yang sadar serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.
- b. Rendahnya Latar Belakang Pendidikan
Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya dalam

melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat kabupaten muna, dalam kegiatan tersebut masyarakat yang memiliki latar belakang rendah banyak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat kabupaten muna tidak mempengaruhi pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan.

2. Faktor Lingkungan

a. Money Politik

Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya dalam melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat untuk mengurangi money politik di masyarakat tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan praktek money politik pada saat dekat-dekat pemilihan, hal ini menunjukkan bahwa praktek money politik mempengaruhi pendidikan politik PDI Perjuangan.

b. Kampanye Hitam (*Black Campige*)

Berdasarkan hasil penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna dapat dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna melalui pengurusnya dalam melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat kabupaten muna menunjukkan bahwa terjadinya kampanye hitam (*black campige*) pada masyarakat tidak mempengaruhi pendidikan politik PDI Perjuangan Kabupaten Muna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan di atas maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu: *Pertama*, pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan pada masyarakat Kabupaten Muna berjalan dengan baik yaitu dilakukan dengan tiga cara: 1) Partai politik harus memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara supaya masyarakat memiliki kesadaran politik (wah'yu siyasi) dengan cara: kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah, kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik, dan kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik. 2) Partai politik memberikan wawasan kepada masyarakat akan tertanam keyakinan politik yang akan membentuk kepribadian politik (dzat siyasiyah) yaitu dilakukan dengan cara: meningkatkan kemandirian politik, meningkatkan kedewasaan politik, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 3) Munculnya partisipasi politik (musyarokah siyasiyah) untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif yaitu dilakukan dengan cara: mengikuti diskusi politik, mengikuti kampanye politik dan menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). *Kedua*, faktor yang mempengaruhi pendidikan politik PDI Perjuangan pada masyarakat Kabupaten Muna : 1) Faktor individu yaitu apatisme dan sinisme politik tidak menjadi faktor yang mempengaruhi pendidikan politik PDI Perjuangan Kabupaten Muna, Rendahnya latar belakang pendidikan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi pendidikan politik PDI Perjuangan Kabupaten Muna; 2) Faktor lingkungan yaitu *Money politik* menjadi faktor yang mempengaruhi pendidikan politik PDI Perjuangan Kabupaten Muna, Kampanye hitam (*black campige*) tidak menjadi faktor yang mempengaruhi pendidikan politik dalam pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan Kabupaten Muna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman. (2020). Pembangunan Politik dan Kualitas Demokrasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 397-409. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3516>.
- Antoro, Dwi, dkk., (2018). Pembangunan Politik Terhadap Pembanguana Nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 57-65. <https://doi.org/10.33061/glc.z.v5i1.2545>.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6 (1), 1-15. <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.875>.
- Edwin, N. (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 2(1), 54-58. <https://doi.org/10.36706/jbti.v2i1.4560>.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pres.

- Fatwa, N.A. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1615-1626.
- Hermawan, C. I. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(1), 1-19. <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/939/838>.
- Kusuma, W, dkk., (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 1(1), 164-169. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>.
- Pasaribu, P. (2017). Peran Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1), 51-59. <https://10.31289/jppuma.v5i1.1125>.